



Kementerian Agama
Kota Yogyakarta

LAPORAN KEUANGAN

Audited Tahun Anggaran 2025

417613

Jl. Ki Mangunsarkoro
No. 43 A Kota
Yogyakarta
Telp. (0274) 512285,



Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kemenag Kota Yogyakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Agama yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan laporan keuangan Kemenag Kota Yogyakarta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kemenag Kota Yogyakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Yogyakarta, 06 Mei 2026

Kepala Kemenag Kota Yogya



H.Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.

NIP 197911302009011008

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	15
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	19
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	21
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	25
F. Pengungkapan Penting Lainnya	26
VI. Lampiran dan Daftar	

KEMENAG KOTA YOGYAKARTA
Jalan Ki Mangun Sarkoro 43A Yogyakarta 55111

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kemenag Kota Yogyakarta yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Yogyakarta , 06 Mei 2026

Kepala Kemenag Kota Yogya



H.Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
NIP 197911302009011008

Laporan Keuangan Kemenag Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur - unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar nihil atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan-LRA sebesar nihil .

Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp 491.508.639,00 atau mencapai 99,99 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 491.554.000,00 .

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 31 Desember 2025 .

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 5.869.000,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp 529.000,00 , Aset Tetap (neto) sebesar Rp 5.340.000,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar nihil.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar nihil dan Rp 5.869.000,00 .

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp507.526.619 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai -Rp507.526.619. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0 dan defisit sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar -Rp507.526.619.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 21.886.980,00 dikurangi defisit-LO, sebesar (Rp 507.526.619,00), ditambah dengan penyesuaian nilai tahun berjalan sebesar nihil dan koreksi-koreksi sebesar nihil dan ditambah Transaksi Antar Ekuitas sebesar Rp 491.508.639,00 sehingga Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp 5.869.000,00 .

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA

**KEMENAG KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2025		% REAL ANGG.	31 Desember 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	0	0	0,00	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0	0,00	0
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	424.584.000	424.555.200	99,99	267.055.200
Belanja Barang	B.4	66.970.000	66.953.439	99,98	350.079.000
Belanja Modal	B.5	0	0	0,00	9.400.000
Bantuan Sosial	B.6	0	0	0,00	0
JUMLAH BELANJA		491.554.000	491.508.639	99,99	626.534.200



Kepala Kemenag Kota Yogyakarta

H.Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.

NIP. 197911302009011008

KEMENAG KOTA YOGYAKARTA
NERACA
 PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

Uraian 1	Catatan 2	JUMLAH	
		31 Desember 2025 3	31 Desember 2024 4
ASET			
ASET LANCAR			
Persediaan	C.1	529.000	132.000
Jumlah Aset Lancar		529.000	132.000
ASET TETAP			
Peralatan dan Mesin	C.2	192.488.280	192.488.280
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.3	-187.148.280	-170.733.300
Jumlah Aset Tetap		5.340.000	21.754.980
JUMLAH ASET		5.869.000	21.886.980
EKUITAS			
Ekuitas	C.4	5.869.000	21.886.980
JUMLAH EKUITAS		5.869.000	21.886.980
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.869.000	21.886.980

Kepala Kemenag Kota Yogyakarta



H.Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
 NIP. 197911302009011008

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENAG KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN OPERASIONAL
 PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

Uraian 1	Catatan 2	JUMLAH	
		31 Desember 2025 3	31 Desember 2024 4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
JUMLAH PENDAPATAN		0	0
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2	424.555.200	267.055.200
Beban Persediaan	D.3	1.603.000	12.598.000
Beban Barang dan Jasa	D.4	52.103.439	173.326.000
Beban Pemeliharaan	D.5	8.300.000	10.843.000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	4.550.000	113.275.000
Beban Barang Untk Diserahkan Masy.	D.7	0	40.000.000
Beban Bantuan Sosial	D.8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	16.414.980	20.177.480
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	0	0
Beban Lain-lain	D.11	0	0
JUMLAH BEBAN		-507.526.619	-637.274.680
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEG. OPERASIONAL		507.526.619	637.274.680
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.12		
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR		0	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) PENY. KEWAJ JANGK PANJANG		0	0
Pendapatan Peny. Kewaj. Jangk Panjang		0	0
Beban Peny. Kewaj. Jangk Panjang		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEG. NON OPERASIONAL LAINNYA		0	0
Pendapatan dari Keg. Non Operasional Lainnya		0	0
Beban dari Keg. Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEG. NON OPERASIONAL		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		507.526.619	637.274.680
POS LUAR BIASA	D.13		
Pendapatan PNBP		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		507.526.619	637.274.680

Kepala Kemenag Kota Yogyakarta



H.Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
NIP. 197911302009011008

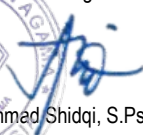
III. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENAG KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

Uraian	Catatan	JUMLAH	
		31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E.1	21.886.980	32.627.460
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	E.2	-507.526.619	-637.274.680
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR			
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.5	0	0
KOREKSI ATAS BEBAN	E.6	0	0
KOREKSI ATAS PENDAPATAN	E.7	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0	0
TRANSAKSI ANTAR EKUITAS		491.508.639	626.534.200
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		-16.017.980	-10.740.480
EKUITAS AKHIR	E.8	5.869.000	21.886.980

Kepala Kemenag Kota Yogyakarta




 H. Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
 NIP. 197911302009011008

A. PENJELASAN UMUM

Dasar hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Kementerian Agama Kab. Sleman

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2018

Keputusan Menteri Agama Nomor 15 tahun 2015 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Kementerian Agama. Pemerintah No. 50 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat.

PMK No. 232/PMK.05/2022 tentang perubahan PMK No. 220/PMK.05/2016 dan PMK No. 177/PMK.05/2015 yang mengatur tentang pedoman penyusunan dan penyampaian laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan instansi

Penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 9 ayat (g) mengamanatkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Pengguna Barang mempunyai tugas menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Laporan Keuangan adalah wujud pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik Kankemenag Kota Yogyakarta didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Entitas berkedudukan di Jalan Ki Mangunsarkoro no. 43 A Yogyakarta.

Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik Kankemenag Kota Yogyakarta mempunyai tugas dan fungsi memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan kualitasnya yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik Kankemenag Kota Yogyakarta berkomitmen dengan visi “mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui pembinaan akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”

- Menyelenggarakan pembinaan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian negara/Lembaga

- Membina secara efektif Kementerian negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

Dalam menyusun Laporan Keuangan Ditjen Bimbingan Masyarakat Katolik Kankemenag Kota Yogyakarta melakukan empat strategi antara lain pensertifikasian tenaga bendahara di tiap Satuan Kerja, penataan aset dan penyelamatan BMN, meminimalisir hasil temuan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor BPK, pelaksanaan LPJ keuangan yang berbasis Akrua dan berdasar peraturan yang berlaku. Dalam upaya menyajikan Laporan Keuangan yang layak, langkah-langkah yang dilakukan oleh Kantor Kementerian Agama kota Yogyakarta diantaranya adalah :

1. Melaksanakan sosialisasi, bimtek dan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal penyusunan Laporan Keuangan;
2. Penunjukkan Duta Akrua SAIBA dan BMN dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan operator dalam menyajikan Laporan Keuangan dan dalam membangun koordinasi dengan operator sejawat dan unit terkait;
3. Melakukan pengamanan aset khususnya aset tanah secara bertahap dengan melakukan proses sertifikasi tanah atas nama Kementerian Agama. Sasaran strategis dalam hal Laporan Keuangan adalah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang selama ini sudah diraih oleh Kementerian Agama.
4. Melakukan penyelesaian nota temuan auditor baik dari BPK, BPKP, dan Inspektorat Jenderal secara kontinu, terkoordinasi dan terarah.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kemenag Kota Yogyakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kemenag Kota Yogyakarta menerapkan basis akrua dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kemenag Kota Yogyakarta dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan Akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Ditjen Bimbingan Masyarakat Khatolik yang merupakan entitas pelaporan dari Kemenag Kota Yogyakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan

Laporan Keuangan Kemenag Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kemenag Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan Audited Kemenag Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2025

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
KurangLancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain:

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak		
Jumlah Pendapatan		
Belanja		
Belanja Pegawai	347.000.000	424.584.000
Belanja Barang	227.880.000	66.970.000
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	574.880.000	491.554.000

Realisasi Pendapatan
nihil

B.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar nihil atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar nihil.

Pendapatan Kemenag Kota Yogyakarta merupakan Pendapatan dari Pengelolaan BMN dan Pendapatan Lain-lain.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan

No	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pend. dari Pengelolaan BMN	0	0	0,00%
2	Pend. Lain-lain	0	0	0,00%
	Jumlah	0	0	0,00%

Realisasi PNBPN Lainnya pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar nihil atau 0,00 persen dibandingkan Tahun Anggaran 2024 yang disebabkan penurunan pendapatan dari pendapatan lain-lain berupa Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL dan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL. Perbandingan realisasi pendapatan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 disajikan dalam tabel dibawah ini:

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pend. Pengelolaan BMN	0	0	0	0,00
2	Pend. Lain-lain	0	0	0	0,00
	Jumlah	0	0	0	0,00

B.2. BELANJA

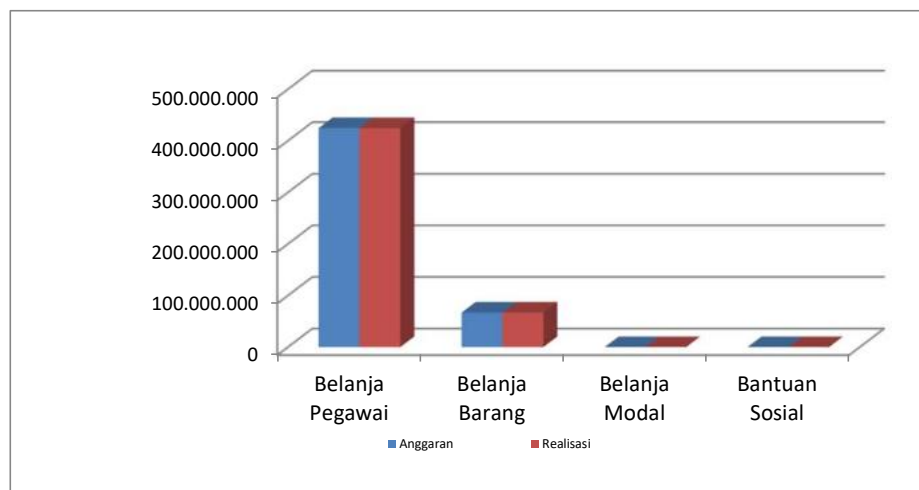
Realisasi Belanja Negara
Rp491.508.639,00

Realisasi belanja Kemenag Kota Yogyakarta pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp491.508.639,00 atau mencapai 99,99 persen dari anggaran senilai Rp491.554.000,00 . Rincian Anggaran dan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	424.584.000	424.555.200	99,99
52	Belanja Barang	66.970.000	66.953.439	99,98
53	Belanja Modal	0	0	-
57	Belanja Bantuan Sosial	0	0	-
	Total Belanja Kotor	491.554.000	491.508.639	99,99
	Pengembalian Belanja		0	-
	Belanja Netto	491.554.000	491.508.639	99,99

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Perbandingan Realisasi Belanja (Bersih) Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 menunjukkan bahwa realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar -21,55 persen dibandingkan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2024. Hal ini disebabkan antara lain: Untuk belanja pegawai pembayaran TPG PAK Non PNS Belum Inpassing dan Sudah Inpassing sejumlah 15 pegawai dan untuk belanja barang terdapat blokir dan dikembalikan ke pusat

Perbandingan realisasi belanja Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat sebagai berikut:

Perbandingan realisasi Belanja Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
		Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	424.555.200	267.055.200	157.500.000	58,98
52	Belanja Barang	66.953.439	350.079.000	-283.125.561	-80,87
53	Belanja Modal	0	9.400.000	-9.400.000	-100,00
	Jumlah	491.508.639	626.534.200	-135.025.561	(21,55)

Belanja Pegawai

Rp424.555.200,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp424.555.200,00 dan Rp267.055.200,00 . Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 58,98 dari realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2025.

Perbandingan rincian belanja adalah sebagai berikut:

Perbandingan Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	(Rp)	%
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	424.555.200	267.055.200	157.500.000	58,98
Jumlah Belanja Kotor	424.555.200	267.055.200	157.500.000	58,98
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0	0,00
Realisasi Belanja Bersih	424.555.200	267.055.200	157.500.000	58,98

Belanja Barang

Rp66.953.439,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp66.953.439,00 dan Rp350.079.000,00 . Realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar - 80,87 persen dari realisasi belanja barang Tahun Anggaran 2024. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar -80,87 persen disebabkan adanya kenaikan belanja perjalanan dinas . Rincian Belanja Barang disajikan sebagai berikut:

Perbandingan Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Realisasi Belanja (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	(Rp)	%
Belanja Keperluan Perkantoran	17.419.239	23.095.000	-5.675.761	-24,58
Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	29.520.000	29.520.000	0	0,00
Belanja Bahan	0	18.077.000	-18.077.000	-100,00
Belanja Honor Output Kegiatan	0	8.150.000	-8.150.000	-100,00
Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	35.200.000	-35.200.000	-100,00
Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam	0	31.120.000	-31.120.000	-100,00
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2.000.000	2.135.000	-135.000	-6,32

Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5.164.200	5.164.000	200	0,00
Belanja Sewa	0	2.600.000	-2.600.000	-100,00
Belanja Jasa Profesi	0	20.400.000	-20.400.000	-100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.300.000	0	8.300.000	0,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4.550.000	20.240.000	-15.690.000	-77,52
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	73.635.000	-73.635.000	-100,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	19.400.000	-19.400.000	-100,00
Belanja Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan Kepada	0	10.500.000	-10.500.000	-100,00
Belanja Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan Kepada	0	40.000.000	-40.000.000	-100,00
Realisasi Belanja Kotor	66.953.439	339.236.000	-202.382.561	-59,66
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0	0,00
Realisasi Belanja Bersih	66.953.439	339.236.000	-202.382.561	(59,66)

Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
nihil

B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dan Tahun

Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar nihil dan Rp9.400.000,00 .

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin mengalami penurunan dikarenakan pada Tahun Anggaran 2024 terdapat pembelian lemari kayu dan printer .

Perbandingan rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	9.400.000	-9.400.000	-100,00
Realisasi Belanja Bruto	0	9.400.000	-9.400.000	-100,00
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0	0,00
Realisasi Belanja Netto	0	9.400.000	-9.400.000	(100,00)

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

Persediaan
Rp529.000,00

C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp529.000,00 dan Rp132.000,00 . Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Barang Konsumsi	Rp 529.000	Rp 132.000
Jumlah		Rp 529.000	Rp 132.000

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik dan telah dilakukan opname fisik pada tanggal pelaporan 31 Desember 2025.

Peralatan dan Mesin
Rp192.488.280,00

C.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp192.488.280,00 dan Rp192.488.280,00 .

Peralatan dan mesin tidak mengalami perubahan/tetap .

Saldo per 31 Desember 2024	Rp	192.488.280,00
Mutasi tambah:		
Pembelian	Rp	-
	Rp	-
Mutasi kurang:		
Saldo per 31 Desember 2025	Rp	192.488.280,00

* Rincian penambahan dari Pembelian Peralatan dan Mesin :

No.	Jenis Barang	Vol	Harga	Total
1				
2				
JUMLAH				Rp -

Akumulasi Penyusutan
(Rp187.148.280,00)

C.3 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar (Rp187.148.280,00) dan (Rp170.733.300,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	Rp 192.488.280	Rp 187.148.280	Rp 5.340.000
Jumlah		Rp 192.488.280	Rp 187.148.280	Rp 5.340.000,00

Ekuitas Rp5.869.000,00

C.4 Ekuitas

Jumlah Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp5.869.000,00 dan Rp21.886.980,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Realisasi Pendapatan
nihil

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-

masing sebesar nihil dan nihil. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0,00
	Jumlah	0	0	0	0,00

Beban Pegawai Rp
424.555.200,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah beban pegawai Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 424.555.200,00 dan Rp267.055.200,00 . Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Beban (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	(Rp)	%
Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	424.555.200	267.055.200	157.500.000	58,98
Jumlah	424.555.200	267.055.200	157.500.000	58,98

Beban Persediaan
Rp1.603.000,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.603.000,00 dan Rp12.598.000,00 . Beban persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian beban persediaan sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Beban (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	(Rp)	%
Beban Persediaan Konsumsi	1.603.000	12.598.000	-10.995.000	-87,28
Jumlah Beban Persediaan	1.603.000	12.598.000	-10.995.000	-87,28

Beban Barang dan Jasa
Rp52.103.439,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp52.103.439,00 dan Rp173.326.000,00. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Beban (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	(Rp)	%
Beban Keperluan Perkantoran	17.419.239	23.095.000		
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	29.520.000	29.520.000		
Beban Bahan	0	18.077.000	-18.077.000	-100,00
BebanBarang non operasional Lainnya	0	35.200.000	-35.200.000	-100,00
Beban Honor Output Kegiatan	0	8.150.000	-8.150.000	-100,00
Beban Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	0	31.120.000	-31.120.000	-100,00
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5.164.200	5.164.000	200	0,00
Beban Sewa	0	2.600.000	-2.600.000	-100,00
Beban Jasa Profesi	0	20.400.000	-20.400.000	-100,00
Jumlah	52.103.439	173.326.000	-115.546.800	-66,66

Beban Pemeliharaan
Rp8.300.000,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp8.300.000,00 dan Rp10.843.000,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondidi normal. Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Beban (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	(Rp)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	0	0	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.300.000	10.843.000	-2.543.000	-23,45
Jumlah	8.300.000	10.843.000	-2.543.000	-23,45

Beban Perjalanan Dinas
Rp4.550.000,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.550.000,00 dan Rp113.275.000,00. Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Beban (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	(Rp)	%
Beban Perjalanan Biasa	4.550.000	20.240.000	-15.690.000	-77,52
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	73.635.000	-73.635.000	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	19.400.000	-19.400.000	-100,00
Jumlah	4.550.000	113.275.000	-108.725.000	-95,98

Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat nihil

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Jumlah Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar nihil dan Rp40.000.000,00. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat.

Beban Bantuan Sosial
nihil

D.8 Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar nihil dan nihil. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp16.414.980,00

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16.414.980,00 dan Rp20.177.480,00. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk aset tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Beban (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	(Rp)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	16.414.980	20.177.480	36.592.460	181,35
Jumlah Penyusutan	16.414.980	20.177.480	36.592.460	181,35

D.10 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar nihil dan nihil. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Beban (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	(Rp)	%
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0,00
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	0	0	0	0,00
Jumlah	0	0	0	0,00

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional nihil

D.11 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024

Uraian	Beban (Rp)		Kenaikan/(Penurunan)	
	Tahun Anggaran 2025	Tahun Anggaran 2024	(Rp)	%
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	0	0		
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0			
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0		
Jumlah	0	0	0	0,00

Pos Luar Biasa nihil

D.12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2024 adalah masing-masing sebesar nihil dan nihil.

E. PENJELASAN ATAS POS- POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal
Rp21.886.980,00*

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21.886.980,00 dan Rp32.627.460,00 .

*Defisit LO
(Rp507.526.619,00)*

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp507.526.619,00) dan (Rp637.274.680,00). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Penyesuaian Nilai Aset
NIHIL*

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar nihil dan nihil.

*Koreksi Nilai Persediaan
NIHIL*

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar nihil dan nihil.

*Koreksi Aset Tetap
NIHIL*

E.5 Koreksi Aset Tetap

Koreksi atas Nilai Perolehan Aset Tetap merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan. Koreksi pencatatan aset tetap per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar nihil dan nihil.

*Koreksi atas Beban
NIHIL*

E.6 Koreksi atas Beban

Koreksi atas Beban merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas beban per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar nihil dan nihil.

*Koreksi atas Pendapatan
NIHIL*

E.7 Koreksi atas Pendapatan

Koreksi atas Pendapatan merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan. Koreksi atas pendapatan per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar nihil dan nihil.

*Ekuitas Akhir
Rp5.869.000,00*

E.8 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp5.869.000,00 dan Rp21.886.980,00 .

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak ada

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

- Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional di Jl.Ki Mangunsarkoro, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166 adalah:
- Rekening Induk : RKK DITJEN BIMAS KATOLIK KEMENAG OPS (3007202078)

- Rekening Satker : BPG 030 KEMENAG KOTA YK 41761 (9891864176131000) BNI

- DIPA Satker Ditjen Bimas Katolik selama Tahun Anggaran 2025 :
- DIPA Awal SP-DIPA-025.06.2.417613/2025 TGL 02/12/2024 TOTAL DIPA RM Rp 574.880.000,00

- Revisi ke 01 SP-DIPA-025.06.2.417613/2025 TGL 22/02/2025 TOTAL DIPA RM Rp 574.880.000,00
- RRevisi ke 02 SP-DIPA-025.06.2.417613/2025 TGL 25/02/2025 TOTAL DIPA RM Rp 574.880.000,00
- Revisi ke 03 SP-DIPA-025.06.2.417613/2025 TGL 10/04/2025 TOTAL DIPA RM Rp 574.880.000,00
- Revisi ke 04 SP-DIPA-025.06.2.417613/2025 TGL 03/07/2025 TOTAL DIPA RM Rp 574.880.000,00
- Revisi ke 05 SP-DIPA-025.06.2.417613/2025 TGL 18/09/2025 TOTAL DIPA RM Rp 574.880.000,00
- Revisi ke 06 SP-DIPA-025.06.2.417613/2025 TGL 07/10/2025 TOTAL DIPA RM Rp 574.880.000,00
- Revisi ke 07 SP-DIPA-025.06.2.417613/2025 TGL 21/12/2025 TOTAL DIPA RM Rp 491.554.000,00

- * Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kemenag Kota Yogyakarta Nomor 352 Tahun 2025 tentang Penetapan PPK, PPSPM, BP dan Staf Pengelola Keuangan pada BIMAS Katolik TA 2025 Terhitung mulai 20 Agustus 2025 DIPA satker 417613.
 1. H. Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng sebagai Kuasa pengguna Anggaran (KPA)
 2. Sri Subekti, S.Th.I sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 3. Lia Anggriany, SE sebagai Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)
 4. Ipah Karyani sebagai Bendahara Pengeluaran
 5. Yohanes Resmiyanto, S.Sos sebagai Staf Pengelola
 6. Athanasia Nita Puspitasari, S.E., sebagai Staf Pengelola

* Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Kemenag Kota Yogyakarta Nomor 340.1 Tahun 2025 tentang Penetapan Tim SAI pada Bimas Katolik TA 2025 Terhitung mulai 20 Agustus 2025 DIPA satker 417613.

1. H. Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng sebagai Penanggungjawab
2. H. Ahmad Mustafid, S.Ag., M.Hum sebagai Koordinator
3. Lia Anggriany, SE sebagai Ketua
4. Dwi Kuswindaryati, M.S.I. sebagai Anggota
5. Aisyah Arafatuz Zahraa, sebagai Anggota

* Pengungkapan Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN pada Catatan Atas laporan Keuangan Kementerian Agama Kota Yogyakarta satker 417613: terlampir

F.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN BPK

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 06
SATUAN KERJA : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA 417613

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 3:32 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	491,554,000	491,508,639	(45,361)	100	627,138,000	626,534,200	603,800	100
1. Belanja Pegawai	424,584,000	424,555,200	(28,800)	100	267,056,000	267,055,200	800	100
2. Belanja Barang	66,970,000	66,953,439	(16,561)	100	350,082,000	350,079,000	3,000	100
3. Belanja Modal	0	0	0	0	10,000,000	9,400,000	600,000	94
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA 025
ESELON I : DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK 06
SATUAN KERJA : KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA 417613

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 3:32 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	491,554,000	491,508,639	(45,361)	100	627,138,000	626,534,200	603,800	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

AHMAD SHIDQI
NIP 197911302009011008

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (417613) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:32 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	529,000	132,000	397,000	300.76
JUMLAH ASET LANCAR	529,000	132,000	397,000	300.76
ASET TETAP				
Peralatan dan Mesin	192,488,280	192,488,280	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(187,148,280)	(170,733,300)	(16,414,980)	9.61
JUMLAH ASET TETAP	5,340,000	21,754,980	(16,414,980)	(75.45)
JUMLAH ASET	5,869,000	21,886,980	(16,017,980)	(73.18)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	5,869,000	21,886,980	(16,017,980)	(73.18)
JUMLAH EKUITAS	5,869,000	21,886,980	(16,017,980)	(73.18)
JUMLAH EKUITAS	5,869,000	21,886,980	(16,017,980)	(73.18)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	5,869,000	21,886,980	(16,017,980)	(73.18)

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

AHMAD SHIDQI

NIP 197911302009011008

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (417613) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:31 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	424,555,200	267,055,200	157,500,000	58.977
Beban Persediaan	1,603,000	12,598,000	(10,995,000)	(87.276)
Beban Barang dan Jasa	52,103,439	173,326,000	(121,222,561)	(69.939)
Beban Pemeliharaan	8,300,000	10,843,000	(2,543,000)	(23.453)
Beban Perjalanan Dinas	4,550,000	113,275,000	(108,725,000)	(95.983)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	40,000,000	(40,000,000)	(100)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA
ESELON I : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
SATUAN KERJA : (417613) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM
Tgl Cetak : 06/05/26 3:31 PM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	16,414,980	20,177,480	(3,762,500)	(18.647)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	507,526,619	637,274,680	(129,748,061)	(20.36)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(507,526,619)	(637,274,680)	129,748,061	(20.36)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(507,526,619)	(637,274,680)	129,748,061	(20.36)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(507,526,619)	(637,274,680)	129,748,061	(20.36)

Keterangan :
FINAL

Yogyakarta, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

AHMAD SHIDQI
NIP 197911302009011008

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (417613) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:32 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	21,886,980	32,627,460	(10,740,480)	(32.92)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(507,526,619)	(637,274,680)	129,748,061	(20.36)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	491,508,639	626,534,200	(135,025,561)	(21.55)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(16,017,980)	(10,740,480)	(5,277,500)	49.14
EKUITAS AKHIR	5,869,000	21,886,980	(16,017,980)	(73.18)

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 6 Mei 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

AHMAD SHIDQI

NIP 197911302009011008

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 06
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 417613
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
DI YOGYAKARTA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 06/05/26 3:33 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 6/5/26 2:13 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5115	Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS							
511521	Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	347,000,000	424,584,000	424,555,200	0	424,555,200	99.99	28,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5115	347,000,000	424,584,000	424,555,200	0	424,555,200	99.99	28,800
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	347,000,000	424,584,000	424,555,200	0	424,555,200	99.99	28,800
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	23,000,000	17,420,000	17,419,239	0	17,419,239	100	761
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	29,520,000	29,520,000	29,520,000	0	29,520,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	52,520,000	46,940,000	46,939,239	0	46,939,239	100	761
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	6,587,000	0	0	0	0		0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6,900,000	0	0	0	0		0
521233	Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk	38,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	51,487,000	0	0	0	0		0
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	4,000,000	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,180,000	5,180,000	5,164,200	0	5,164,200	99.69	15,800
522151	Belanja Jasa Profesi	13,000,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	18,180,000	5,180,000	5,164,200	0	5,164,200	99.69	15,800
5231	Belanja Pemeliharaan							
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,300,000	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	8,300,000	8,300,000	8,300,000	0	8,300,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	4,550,000	4,550,000	0	4,550,000	100	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	45,297,000	0	0	0	0		0
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	17,216,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	82,513,000	4,550,000	4,550,000	0	4,550,000	100	0
5261	Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda							
526115	Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	10,880,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5261	10,880,000	0	0	0	0		0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 025
ESELON I : 06
WILAYAH/PROVINSI : 0400
SATUAN KERJA : 417613
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN AGAMA
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK
DI YOGYAKARTA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 06/05/26 3:33 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 6/5/26 2:13 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	227,880,000	66,970,000	66,953,439	0	66,953,439	99.98	16,561
	JUMLAH BELANJA	574,880,000	491,554,000	491,508,639	0	491,508,639	99.99	45,361

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (025) KEMENTERIAN AGAMA

UNIT ORGANISASI : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK

WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA

SATUAN KERJA : (417613) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 06/05/26 7:33 AM

Tgl Cetak : 06/05/26 3:33 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	529,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	192,488,280	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	187,148,280
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	491,508,639
0.0	391111	Ekuitas	0	21,886,980
3.0	511521	Beban Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	424,555,200	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	17,419,239	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	29,520,000	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	5,164,200	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8,300,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	4,550,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	16,414,980	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	1,603,000	0
JUMLAH			700,543,899	700,543,899

Keterangan :

FINAL

Yogyakarta, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

AHMAD SHIDQI
NIP 197911302009011008

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - AUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 417613 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl.Data : 06/05/26 12:35 PM
Tgl.Cetak : 06/05/26 3:34 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	529,000
132111	Peralatan dan Mesin	192,488,280
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(187,148,280)
J U M L A H		5,869,000

Yogyakarta, 6 Mei 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

H.Ahmad Shidqi, S.Psi., M.Eng.
NIP 197911302009011008

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - AUDITED

UAPB : 025 KEMENTERIAN AGAMA
UAKPB : 417613 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Tgl Data : 06/05/26 12:35 PM
Tanggal : 06/05/26 3:36 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010302001	Kertas HVS	529,000
Jumlah Barang Konsumsi		529,000
TOTAL		529,000

Keterangan :
1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.



DETAIL INDIKATOR KINERJA DETAIL CAPAIAN RO

NO	Kode Satker	Nama Satker	KPPN	Bulan	Program	Kegiatan	KRO	RO	Uraian RO	Pagu	Realisasi	Full Blokir	Target	Satuan	Realisasi RO	Progress RO	Status Terkonfirmasi	Status Validasi	Jenis RO	Cara Pelaporan	Polarisasi Capaian	Polarisasi Waktu	Target RVRO	Target PCRO	Nilai
1	417613	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	030	12	DI	4435	QEK	003	Guru Agama Non ASN penerima Tunjangan Profesi	424.584.000	424.555.200	N	15	Orang	15	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	3	Maximize	Stabilized	15	15	100
2	417613	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	030	12	WA	2141	EBA	994	Layanan Perkantoran	48.900.000	48.883.712	N	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	1	1	100
3	417613	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA	030	12	WA	5102	EBA	994	Layanan Perkantoran	18.070.000	18.069.727	N	1	Layanan	1	100	terkonfirmasi	00 - Data Valid	2	1	Maximize	Stabilized	1	1	100
Total Nilai Jumlah Output																								3003	

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN

Bulan: Desember 2025

Kementerian/Lembaga : (025) KEMENTERIAN AGAMA

Tgl, No. SP : 02 Desember 2024 , DIPA-025.06.2.417613/2025

Unit Organisasi : (06) DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK Tahun : 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota : (04.51) DI YOGYAKARTA / KOTA YOGYAKARTA KPPN : (030) Yogyakarta

Satuan Kerja : (417613) KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA

Alamat dan No Telp :

I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00001/SSBP/417613/2025

	Jenis Buku Pembantu	Saldo Awal (Rp.)	Penambahan (Rp.)	Pengurangan (Rp.)	Saldo Akhir (Rp.)
1	2	3	4	5	6
A	BP Kas, BPP dan UM	6.000.000,00	3.663.750,00	9.663.750,00	0,00
	1. BP Kas (Tunai & Bank)	6.000.000,00	3.663.750,00	9.663.750,00	0,00
	2. BP UM (Voucher)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP BPP	0,00	0,00	0,00	0,00
B	BP Selain Kas	6.000.000,00	3.390.350,00	9.390.350,00	0,00
	1. BP UP*)	6.000.000,00	3.390.350,00	9.390.350,00	0,00
	2. BP TUP*)	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. BP LS-Bendahara	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. BP Pajak	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. BP Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. BP Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

*) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00

II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan

1. Uang Tunai di Brankas	Rp.	0,00	
2. Uang di Rekening Bank	Rp.	0,00	(terlampir salinan rekening koran)
3. Jumlah Kas	Rp.	0,00	

III. Selisih Kas

1. Saldo Akhir BP Kas (I.A 1 kolom (6))	Rp.	0,00
2. Jumlah Kas (II.3)	Rp.	0,00
3. Selisih Kas	Rp.	0,00

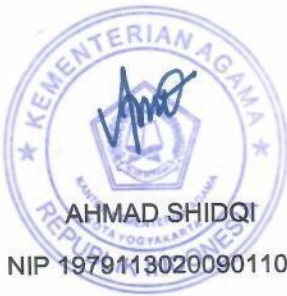
IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA

A. UP		
1. Saldo UP	Rp.	0,00
2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP	Rp.	0,00
4. Saldo UP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan UP	Rp.	0,00
B. TUP		
1. Saldo TUP	Rp.	0,00
2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	Rp.	0,00
3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP	Rp.	0,00
4. Saldo TUP menurut UAKPA	Rp.	0,00
5. Selisih Pembukuan TUP	Rp.	0,00
C. Lainnya		
1. Saldo Lainnya	Rp.	0,00
2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA	Rp.	0,00
3. Selisih Pembukuan Lainnya	Rp.	0,00

V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan (apabila ada)

- 1. Selisih Kas (III.3) : 0,00-
- 2. Selisih Pembukuan UP (IV.A.5) : 0,00-
- 3. Selisih Pembukuan TUP (IV.B.5) : 0,00-
- 4. Selisih Pembukuan Lainnya (IV.C.3) : 0,00-

Mengetahui
Kuasa Pengguna Anggaran


AHMAD SHIDQI
NIP 197911302009011008

KOTA YOGYAKARTA, Desember 2025
Bendahara Pengeluaran


IPAH KARYANI
NIP 197001052007012049



Mutasi Transaksi (31/12/2025 - 31/12/2025)

downloaded at 23/02/2026 11:25:25

KEMENTERIAN AGAMA (025)									
DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KATOLIK (06)									
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA YOGYAKARTA 417613 (417613)									
Rekening Induk : RKK DITJEN BIMAS KATOLIK KEMENAG OPS (3007202078)									
Rekening Satker : BPG 030 KEMENAG KOTA YK 41761 (9891864176131000)									
Tanggal	Waktu	ID Transaksi	Remarks	Saldo Awal	Debit	Kredit	Saldo Akhir	Channel	Klasifikasi
Total Mutasi					Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0		
No records found									